

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Reviu

Dalam sebuah karya tulis ilmiah, terutama dalam skripsi, tidak ada yang bersifat asli (*original*) dan benar-benar baru yang dihasilkan oleh penulis. Semua bentuk penelitian tersebut tidak dapat terlepas dari penelitian terdahulu ataupun melakukan revisi terhadap penelitian terdahulu. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa penting melakukan perbandingan terhadap karya tulis terdahulu mengenai *Bagaimana Peningkatan Pertahanan Militer Tiongkok dan respon Jepang dalam melihat adanya peningkatan pertahanan tersebut*. Untuk itu, penulis akan meninjau kembali beberapa sumber literatur terdahulu terkait dengan dampak *Peningkatan Pertahanan Militer Tiongkok terhadap Keamanan Jepang*.

Jepang merupakan salah satu negara yang di Kawasan Asia Timur Jepang memiliki pertahanan militer yang cukup kuat terutama dengan dipayungi negara adidaya Amerika Serikat, hal ini membuat negara yang berada di sekitar Asia Timur merasakan kekuatan dari Jepang terutama Tiongkok yang seperti kita ketahui bahwa negara Tiongkok memiliki kekuatan dari berbagai aspek terutama ekonomi yang kian melesat hingga keamanan yang tiap tahun selalu membaik.

Penelitian pertama oleh Nuri Widiastuti Veronica, (2014) yang berjudul *Rivalitas China dan Jepang Dalam Institusi Regional Asia Timur*. Penelitian ini menyebutkan bahwa Kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang menjadi arena perebutan pengaruh geopolitik atau sering disebut sebagai *the grand chessboard for geopolitical struggles*. Hal ini membuat kawasan tersebut menjadi rumah bagi beberapa kekuatan regional dan menjadi arena penyebaran kekuatan global seperti

Amerika Serikat. Dinamika keamanan dan politik di Kawasan ini rapuh karna minimnya rasa saling percaya antar kekuatan besar tersebut. Interdependensi yang terjadi antara China dan Jepang tidak membuat kedua negara ini berhenti bersaing, dengan adanya sejarah permusuhan, ketidakpercayaan, dan persaingan dalam peningkatan kapabilitas militer yang pada akhirnya membuat persaingan ini semakin besar.

Sementara itu, menurut Chalmers Johnson, institusi regional yang menjamin keamanan di Asia Timur dapat terbentuk apabila didasari oleh interdependensi antara aktor-aktor besar yang ada di kawasan ini, khususnya Jepang dan Cina. Persaingan antara Jepang dan Cina dalam merebut kepemimpinan untuk mendorong integrasi kawasan Asia Timur dapat dilihat dari peran kedua negara besar itu dalam berbagai forum multilateral seperti ASEAN Plus Three (APT), Six Party Talks (6PT), dan ASEAN Regional Forum (ARF). Sementara itu, peran Jepang yang sangat dominan dalam forum East Asia Summit juga dianggap sebagai perpanjangan tangan kepentingan nasional Jepang yang ingin menjadi kekuatan regional yang unggul secara ekonomi di Kawasan. Hal ini jelas membuat keduanya tidak bisa menjalin hubungan yang baik terutama bekerja sama dalam institusi regional Asia Timur, karna keduanya mempunyai kekuatan besar serta pengaruh yang besar juga di Kawasan tersebut.

Dengan adanya peningkatan militer yang dilakukan oleh Tiongkok, membuat Jepang merasakan adanya *Security Dilemma*. Karena seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa Jepang dan Tiongkok merupakan *Rival* terutama diwilayah ini mereka saling berebut pengaruh dan juga dengan adanya sengketa wilayah membuat kedua

negara ini dihadapkan pada melakukan keamanan penuh untuk keamanan nasionalnya.

Penelitian selanjutnya oleh Laode Muhamad Fathun, (2016) yang berjudul *Pengaruh Peningkatan Kekuatan Militer Tiongkok Terhadap Keamanan Stabilitas Regional Asia Timur*. Penelitian ini menyebutkan bahwa meningkatnya anggaran militer Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan dan beberapa negara lainnya menunjukkan bahwa militer adalah sebagai instrument pemukul psikologis negara lain untuk memberitahukan secara nonverbal. Dengan peningkatan anggaran militer, transformasi alat militer, pelatihan prajurit merupakan pemberitahuan secara nonverbal, hal ini merupakan upaya negara dalam memperoleh pengakuan *previlage* bahwa negara tersebut sangat kuat.

Den Xio Ping fokus memimpin dengan emansipasi pemikiran. Modernisasi peralatan militer merupakan salah satu cara Tiongkok untuk menjadi salah satu negara yang kuat dalam bidang militer. Tiongkok tidak pernah akan melupakan sejarah, yang membuat Tiongkok di bayangi oleh kisah perang. Menurutnya alokasi anggaran belanja negara yang besar sangat penting bagi Tiongkok sebagai bentuk pertahanan nasional dan harus di jamin oleh negara. Dengan demikian, hal di atas menunjukkan konsistensi Tiongkok untuk meningkatkan kapasitas militernya merupakan langkah strategis.

Dengan kondisi wilayah negara seperti Jepang, Korea Selatan yang sejak dahulu merupakan musuh Tiongkok menunjukkan bahwa Tiongkok tidak akan membawa kesalahan di masalalu sebagai hal yang terulang. Karena dengan meningkatnya anggaran militer Tiongkok membuat negara ini menjadi lebih kuat dalam menjaga keamanan nasional, maka negara di sekitar wilayah Tiongkok pasti

merasa adanya *Security Dilemma*. Karena dengan meningkatnya anggaran militer Tiongkok menunjukkan bahwa ini adalah upaya *deterrence* atau pukulan psikologis bahwa Tiongkok merupakan suatu negara yang kuat.

Penelitian selanjutnya oleh Angga Nurdin Rachmat, (2017) yang berjudul *Security Dilemma Dalam Dinamika Hubungan Bilateral China dan Jepang*. Dalam penelitian ini penulis menyebutkan adanya security dilemma dalam hubungan antara China dan Jepang, hal security dilemma didefinisikan sebagai sebuah spiral aksi dan reaksi dibidang keamanan (pembangunan persenjataan). Dalam fenomena ini menjadi pandangan umum bahwa bagaimana China dan Jepang merasa bahwa negaranya terancam dengan perkembangan militer masing-masing negara. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya sengketa wilayah yang melibatkan dua negara ini dalam memperebutkan kepulauan Senkaku (sebutan dari Jepang) atau Diayou (sebutan dari China).

China mempunyai dua tujuan utama dalam modernisasi militernya, yakni yang pertama untuk membangun dan menempatkan kekuatan militer yang modern dan komprehensif untuk meningkatkan statusnya menjadi *major power*. Lalu yang kedua yakni untuk mengembangkan daya jangkau Angkatan perangnya terkait permasalahan Taiwan. Jepang pun merespon aksi Cina tersebut dengan mengembangkan berbagai kemampuan sistem pertahanannya seperti kemampuan anti rudal Balistik yang dikembangkan bersama dengan Amerika Serikat, serta kemampuan pertahanan berbasis ruang angkasa untuk mengantisipasi munculnya ancaman dari ruang angkasa.

Kedua negara ini menjadi salah satu kunci dari stabilitas keamanan di kawasan ini, karena baik dari segi ekonomi ataupun militer kedua negara ini masih

menjadi yang cukup diperhitungkan. Namun hingga saat ini dinamika tersebut lebih mengarah kepada enmity dimana hal ini membuat adanya ketegangan situasi dikawasan tersebut. Pola hubungan yang terbentuk tersebut diperburuk dengan adanya sengketa wilayah yang melibatkan dua negara ini yaitu pulau Diayou/Senkaku yang semakin membuat ketegangan keduanya meningkat. Dan meningkatnya kekuatan di salah satu negara membuat negara lain merasa *Security Dilemma* karena jika tidak ada yang dilakukan ditakutkan keamanan nasional nya pun akan terancam.

2.2. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah proses penelitian, kerangka pemikiran ini diperlukan untuk memperkuat Analisa dan sebagai landasan berpijak. Untuk menganalisis masalah yang diangkat penulis mencoba memaparkan konsep dari masing-masing masalah dan korelasinya dengan teori yang relevan.

2.2.1. Hubungan Internasional

Hubungan antarnegara atau Hubungan Internasional merupakan hubungan yang sifatnya global hal ini meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketaatanegaraan. Para ahli sering menganggap konsepsi Hubungan Internasional sama atau dipersamakan dengan konsepsi hubungan luar negeri, politik luar negeri, dan juga politik internasional. Hubungan internasional berlangsung sangat dinamis, di mana berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan antar negara.

Hubungan internasional berhubungan dengan subjek internasional yaitu seperti OI atau Organisasi Internasional, politik internasional bisa

berupa diplomasi dan juga hukum internasional, jika dilihat dari subyeknya hubungan internasional dapat berupa:

1. Hubungan individual, yaitu hubungan perorangan atau interpersonal antara warga negara dengan warga negara lain, ada juga hubungan antarpribadi yang maksud dan tujuannya sama dengan hubungan perorangan. Untuk menimbulkan timbal balik diantara individu individu tersebut maka mereka saling mengadakan kontak kontak pribadi.
2. Hubungan antar kelompok, yaitu hubungan antara kelompok suatu negara dengan kelompok negara lain. Misalnya hubungan antarorganisasi sosial politik, antarlembaga agama, dan juga antarlembaga sosial.
3. Hubungan antarnegara, yaitu hubungan antarbadan pemerintah, antarbadan public, dan juga antarbadan lembaga suatu negara dengan negara lainnya. Biasanya bertindak sebagai institusi.

Menurut Mc. Clelland Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang Meliling interaksi. Aktor-aktor internasional, seperti individu nation state, maupun organisasi internasional yang sifatnya lintas batas adalah yang melakukan Hubungan Internasional.

Ada 5 faktor dalam hubungan internasional, yaitu:

1. Adanya Individu-individu tertentu
2. Kelompok-kelompok dan organisasi swasta
3. Seluruh negara bangsa beserta pemerintahnya
4. Organisasi Internasional

5. Semua wilayah geografis dan pengelompokan-pengelompokan politik utama dunia.

Hubungan Internasional jika dilihat dari sifatnya dapat berupa:

1. Hubungan bilateral adalah hubungan yang melibatkan dua negara.
2. Hubungan multilateral adalah hubungan yang melibatkan banyak negara.
3. Hubungan regional, adalah hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan atau region.
4. Hubungan internasional adalah hubungan yang melibatkan lebih dari dua negara dan tidak terikat pada suatu kawasan.
5. Asas-asas hubungan internasional.

2.2.2. Keamanan Nasional

Pada awalnya studi keamanan memang berfokus hanya pada isu militer atau strategi yang didominasi oleh pengaruh aliran Realisme. Dalam bukunya Barry Buzan yang berjudul *Introduction to Strategic Studies: Military technology and international relations*, berasumsi bahwa studi keamanan juga berkaitan dengan politik yang di dalamnya tetap memiliki nilai realisme. Adanya perspektif baru mengenai studi keamanan tersebut, tidak dapat menghilangkan pembahasan mengenai hal teknis dalam militer seperti kapal, nuklir, dan senjata lainnya. Dalam focus ini ada studi keamanan lain yang merupakan perspektif baru yaitu adanya pembahasan politik yang dilakukan melalui *problem solving* yang menjadi kunci bagi studi politik yang berhubungan dengan keamanan.

Definisi keamanan atau *security* cara sederhana sebagai suatu keadaan yang bebas dari segala bentuk baik berupa ancaman, bahaya,

kecemasan, maupun ketakutan. Dalam studi keamanan atau *Security Studies*, paradigma atau pendekatan yang menjadi mainstream utama dalam studi keamanan internasional adalah perspektif realis. Dalam perspektif ini, focus konsep keamanan bersifat terbatas atau di definisikan secara sempit oleh Stephen M. Walt (1991), "*security studies may be defined as the study of the threat, use and control of military force*". Secara singkatnya, menurut Stephen M. Walt, Studi keamanan merupakan studi mengenai fenomena perang. Pendekatan Walt tersebut mewakili perspektif Realisme yang juga dikenal dengan tradisional security atau conventional security. Pendekatan tradisional ini mendefinisikan keamanan adalah suatu istilah Geopolitik dan dibatasi pada hubungan antara negara-negara dan yang berkenaan dengan isu-isu seperti *Balance of power*, *Nuclear deterrence*, dan *military strategy*. Dalam kata lain, ancaman keamanan tradisional (*traditional security/TS*) dapat ditafsirkan sebagai bentuk ancaman keselamatan negara pada aspek militer atau ancaman fisik bersumber dari luar.

Isu keamanan tradisional terbentang luas namun dalam area yang berbeda-beda dan saling terkait kemudian terkadang overlapping atau tumpang tindih seperti ancaman keamanan lingkungan hidup (*environmental security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan energi (*keamanan energi*), keamanan manusia (*human security*), keamanan maritime (*maritime security*), dan lain sebagainya. Semua isu-isu ini dinilai memiliki dampak serius terhadap semua level baik itu bagi keamanan manusia (*human*

security), keamanan regional (*regional security*), keamanan internasional atau global (*International security*). Perkembangan dari segi actor internasional dan isu-isu keamanan itu selanjutnya membuat interaksi keamanan global kontemporer menjadi lebih kompleks dan bervariasi.

2.2.3. Security Dilemma

Logika dilemma keamanan pertama kali dijelaskan oleh sejarawan Inggris Herbert Butterfield pada tahun 1949, istilah itu sendiri diciptakan oleh ilmuwan politik Amerika John Herz pada tahun 1950. Security dilemma atau dilemma keamanan adalah situasi dimana Tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk meningkatkan keamanan negaranya sendiri yang menyebabkan adanya reaksi dari negara lain. Beberapa pakar hubungan internasional berpendapat bahwa dilemma keamanan adalah sumber paling penting dari konflik antar negara. Mereka berpendapat bahwa di ranah internasional, tidak ada monopoli kekerasan yang sah yaitu tidak ada pemerintah dunia dan sebagai konsekuensinya setiap negara harus menjaga keamanan negara nya sendiri.

Maka dari itu tujuan utama suatu negara adalah untuk memaksimalkan keamanan negara nya sendiri, untuk mencapai tujuan tersebut ada banyak tindakan yang dapat dilakukan contohnya pengadaan persenjataan dan pengembangan teknologi militer baru akan menurunkan keamanan negara lain. Penurunan keamanan negara lain tidak otomatis membuat dilemma, namun negara lain cenderung akan mengikuti jika salah satu negara ada yang mempersenjatai diri.

Hal ini karena mereka tidak dapat mengetahui apakah negara yang mempersenjatai diri itu akan menggunakan peningkatan kemampuan militernya untuk menyerang di masa depan. Maka dari itu negara lain lebih memilih untuk meningkatkan kemampuan militer mereka sendiri untuk membangun kembali keseimbangan kekuatan atau mereka akan meluncurkan serangan pendahuluan untuk mencegah negara bersenjata mengganggu keseimbangan di negara mereka. Jika suatu negara memilih untuk menyeimbangkan kekuatan mereka maka hasilnya mungkin Spiral keamanan yaitu proses aksi reaksi di mana dua negara terikat dalam perlombaan senjata dengan masing-masing negara menanggapi peningkatan pengadaan senjata dan pengeluaran pertahanan oleh negara lain yang membuat mereka berdua semakin mempersenjatai diri. Namun jika negara memilih opsi meluncurkan serangan terdahulu maka konflik militer akan segera terjadi.

2.2.4. *Proactive Contribute to Peace*

Berakhirnya Perang Dunia II dan Perang dingin membuat munculnya situasi yang dapat dikatakan mengancam keamanan di sekitar Jepang. Jepang dalam hal ini merasa harus merubah kebijakannya dalam merespon ketidakstabilan keamanan di kawasan, karena Jepang diharuskan untuk berkontribusi lebih aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan keamanan negaranya. Maka Jepang mengimplementasikan kebijakan dasar yaitu *Proactive Contribute to Peace* atau Kontribusi Aktif untuk Perdamaian, dimana hal ini dilakukan karena Jepang perlu berkontribusi lebih aktif untuk perdamaian dan stabilitas kawasan serta

masyarakat internasional, sambil berkoordinasi dengan negara lain termasuk sekutunya, yaitu Amerika Serikat. (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2019)

Kebijakan *Proactive Contribute to Peace* dilandaskan dari prinsip kerja sama internasional, dimana Jepang mencoba untuk lebih aktif dalam berkontribusi dalam mencapai stabilitas yang mengupayakan untuk membangun kepercayaan dan hubungan kerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia. Kebijakan *Proactive Contribute to Peace* ini berawal dari pandangan bahwa Jepang tidak dapat melindungi perdamaian dan keamanannya sendiri, sehingga Jepang perlu berkontribusi secara aktif dengan negara lain untuk menjaga stabilitas keamanan regional. Jepang berusaha untuk dapat menangani permasalahan yang ada dengan meningkatkan peran militernya, hal ini merupakan upaya pencegahan atau *deterrence* untuk mempertahankan diri dari ancaman yang dapat mengancam kepentingan maupun keamanan Jepang dan berupaya untuk berpartisipasi aktif untuk perdamaian internasional.

Dengan adanya transformasi kebijakan pertahanan dan luar negeri Jepang yaitu dengan melakukan re-interpretasi atau penafsiran ulang Pasal 9 Konstitusi 1947, yang berupa pembelaan diri kolektif (*Collective Self Defense*) yaitu dengan memperbolehkan JDSF (*Joint Self Defense Force*) nya terlibat dalam kegiatan militer apabila apabila ada negara sekutu yang terancam oleh serangan dari negara atau bahkan organisasi lainnya. Namun, interpretasi ini menuai kontroversi di mana rakyat Jepang jelas

menolak adanya interpretasi karena dikhawatirkan sikap pasif Jepang akan pudar dan kembali menjadi negara yang agresif.

Namun dalam pandangan pemerintah perdana Menteri Shinzo Abe, melihat situasi yang ada disekitar Jepang membuat Jepang tidak bisa diam saja karena ditakutkan instabilitas ini dapat berpengaruh pada keamanan dan juga kepentingan Jepang. Shinzo Abe memandang bahwa perubahan kebijakan keamanan ini ditujukan untuk Jepang yang lebih aktif atau disebut dengan *Proactive Pasifism* dengan tujuan agar Jepang dapat memberikan kontribusi yang lebih aktif lagi terhadap stabilitas internasional dan tetap pada konstitusinya, yang artinya Jepang tetap berpegang kepada prinsip negara yang cinta damai dan tidak akan mendekati atau berfikir untuk melakukan perang. Dan akhirnya konsep ini menjadi perspektif baru yang dinilai mampu memberikan pesan yang baik kepada masyarakat Internasional.

Dengan adanya penerapan konsep *Proactive Contribute to Peace* dalam bentuk Reinterpretasi atau penafsiran ulang pasal 9 Konstitusi 1947 mendorong Jepang untuk terlibat dalam ke aktivitas keamanan internasional, yaitu pertahanan diri kolektif. Pertahanan diri kolektif ini dilakukan jika adanya serangan langsung terhadap negara yang memiliki hubungan erat dengan Jepang atau bisa dibidang kemitraan strategis atau negara yang beraliansi dengan Jepang di bidang keamanan, sehingga turut menimbulkan ancaman kepada Jepang. *Proactive Contribute to Peace* digunakan sebagai dasar atau landasan kebijakan keamanan Jepang dalam setiap Perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang, yang

bertujuan untuk mengupayakan Jepang berkontribusi aktif dalam perdamaian internasional (Faisol, 2014), selaras dengan penelitian ini *Proactive Contribute to Peace* menjadi landasan dalam respon Jepang terhadap situasi saat ini terutama yang memicu ancaman bagi Jepang.

2.2.5. Strategi Pertahanan Jepang

Melihat adanya banyak kekuatan di Kawasan Asia Timur membuat Jepang harus mempertahankan keamanannya terutama dengan melihat adanya peningkatan pertahanan militer Tiongkok maka Jepang merespon dengan lebih meningkatkan pertahanannya salah satunya dengan cara melakukan penafsiran ulang Pasal 9 Konstitusi 1947 yang tetap berdasar pada kebijakan dasar keamanan *Proactive Contribute to Peace*, kemudian Jepang memperbaharui Pedoman Program Pertahanan Nasional atau NDPG (National Defense Program Guidelines) serta kebijakan-kebijakan pertahanan lainnya

Pasal 9 Konstitusi 1947 merupakan Konstitusi yang menyatakan Jepang menjadi negara yang damai dan menolak penggunaan kekerasan (perang) dalam penyelesaian masalah, kemudian NDPG (*National Defense Program Guidelines*) atau Pedoman Program Pertahanan Nasional menetapkan kebijakan dasar pertahanan Jepang, dan peran kapabilitas pertahanan pedoman dasar kapabilitas pertahanan masa depan, yang mencakup hal-hal seperti SDF (*Self Defense Force*) yaitu Angkatan Bersenjata Jepang, dan target pengadaan mayor serta peralatan. Menyadari bahwa keamanan suatu negara akan bergantung pada upaya nya sendiri, Jepang tidak tinggal diam dalam arti Jepang melakukan upaya penuh untuk

negaranya sendiri dengan cara mencegah berbagai situasi dan akan menanggapi dengan seiring perkembangan situasi yang diawasi oleh Dewan Keamanan Nasional sebagai menara control.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada pertahanan militer Jepang di era Shinzo Abe periode tahun 2014 hingga 2018. Dalam periode ini Jepang membangun arsitektur pertahanan yang komprehensif, kemudian Jepang membangun Pasukan Pertahanan Gabungan Dinamis, melakukan penguatan aliansi Jepang dan Amerika Serikat, promosi aktif kerjasama keamanan, kemitraan strategis dan juga adanya peningkatan anggaran militer Jepang.

Jepang memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat dengan tetap berpegang pada *Proactive Contribute to Peace* karena melihat adanya pergerakan yang cukup jelas terlihat meskipun tidak adanya transparansi namun dapat tinjau bahwa ini merupakan modernisasi militer, bahkan Tiongkok menaikkan anggaran militernya terlihat dari belanja militernya. Jepang pun tetap pada kebijakan dasarnya yaitu tidak hanya memperbaharui NDPG (*National Defense Program Guidelines*), dan memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat saja, namun Jepang juga melakukan kemitraan strategis dengan negara yang ada di sekitar wilayahnya.

Melihat adanya peningkatan anggaran militer serta belanja militer Tiongkok, menjadi *security dilemma* jika Jepang tidak dapat menjaga keamanan nasionalnya. Meskipun Tiongkok disebut menjadi negara ke 2 setelah Amerika Serikat dalam anggaran militernya bukan berarti Jepang

juga harus menjadi nomor 2 dalam anggaran militernya melainkan Jepang harus menambah kekuatan yang dikira dapat mengancam keamanan nasionalnya dengan tetap berpegang pada kebijakan dasar keamanan *Proactive Contribute to Peace*.

2.2.6. Peningkatan Pertahanan Tiongkok

Tiongkok merupakan negara yang bangkit sebagai negara yang memiliki power yang kuat dalam bidang ekonomi dan karena perekonomian yang kian meningkat maka secara langsung pertahanannya pun meningkat terutama dalam anggaran nya karena disokong oleh perekonomian yang meningkat, Tiongkok muncul sebagai negara yang mendominasi di Kawasan Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa Tiongkok mempunyai buku putih yang merupakan pernyataan kebijakan pertahanan negara secara menyeluruh sebagai pedoman bagi penyelenggara fungsi pertahanan negara serta disebarluaskan kepada masyarakat umum baik domestic maupun internasional. Kementerian pertahanan nasional Tiongkok telah merilis buku putih strategi militer Tiongkok public pertama yang menguraikan kebijakan baru “pertahanan aktif” atau “active defense” pada 26 Mei 2015.

Pertahanan Tiongkok secara efektif menjalankan Angkatan bersenjata mereka sejalan dengan perkembangan dan perubahan situasi keamanan nasional. Dipandu oleh keamanan nasional dan strategi pembangunan, dan diperlukan oleh situasi dan tugas mereka di periode sejarah baru, Angkatan bersenjata Tiongkok akan terus menerapkan

pedoman strategis militer, pertahanan militer, pertahanan aktif dan meningkatkan pedoman strategis militer sebagai waktu yang diperlukan.

Untuk menerapkan pedoman strategis militer pertahanan aktif dalam situasi baru, Angkatan bersenjata Tiongkok akan mengoptimalkan tata letak strategis militer. Mengingat bagaimana lingkungan dan geo strategis Tiongkok, ancaman keamanan yang dihadapinya dan tugas-tugas strategis yang mereka pikul, Angkatan bersenjata akan membuat perencanaan keseluruhan untuk penempatan strategis dan disposisi militer, untuk secara jelas membagi wilayah tanggung jawab pasukan mereka.

Ancaman dari domain keamanan baru seperti luar angkasa dan yang maya akan ditangani untuk menjaga keamanan bersama masyarakat dunia, Angkatan bersenjata Tiongkok akan memperkuat Kerjasama keamanan internasional di bidang-bidang yang sangat terkait dengan kepentingan luar negeri Tiongkok, untuk memastikan keamanan kepentingan tersebut.

Militer merupakan strategi Tiongkok yang sangat penting, Tiongkok mengembangkan potensinya di bidang militer yang difokuskan pada AL dan AU. Strategi Tiongkok di bidang pertahanan adalah penguatan kekuatan militer yakni dengan menaikkan anggarannya dan memodernisasi peralatan militer sehingga pasukannya menjadi lebih profesional. Tidak dapat dipungkiri bahwa di Asia Timur terjadi perlombaan senjata yang pada akhirnya merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan. Pembangunan senjata militer, baik senjata nuklir maupun senjata konvensional, akan saling mempengaruhi kebijakan negara-negara di Kawasan tersebut.

Pertahanan aktif berarti strategi militer yang defensive dan menyatakan bahwa Tiongkok tidak akan memulai suatu perang agresi, tetapi terlibat di perang untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integrasi teritorialnya, Tiongkok hanya akan menyerang apabila diserang. Maka dari itu hingga saat ini Tiongkok hanya berusaha untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya di dorong oleh perekonomian Tiongkok yang meningkat, namun jika perekonomian Tiongkok tidak ada peningkatan pun Tiongkok tetap akan pertahanannya dalam kekuatan yang stabil bahkan meningkat.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan diatas maka penulis memiliki asumsi utama yakni *“Dengan adanya peningkatan pertahanan militer Tiongkok yang dapat mengancam kepentingan Jepang, maka Jepang pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe melakukan reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 sebagai implementasi dari Proactive Contribute to Peace”*

2.4. Variabel dan Indikator Penelitian

<p>Variabel dalam</p> <p>Hipotesis</p> <p>(Teoritik)</p>	<p>Indikator</p> <p>(Empirik)</p>	<p>Verifikasi (Analisis)</p>
---	---	-------------------------------------

	<p>3. Konflik Wilayah</p>	<p>bersenjata terbesar di dunia.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://internasional.kompas.com/read/2014/03/05/1519555/Anggaran.Pertahanan.China.Naik.12.2.Perse.n.Jadi.Rp.1.525.Triliun</p> <p>2. Anggaran belanja militer tahun 2018 hingga 8,1% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Zhang Yesui, Juru bicara Kongres Rakyat Nasional (NPC), mengatakan anggaran pertahanan 2018 akan menjadi 1,11 triliun yuan atau setara dengan Rp. 2500 triliun. Namun, Tiongkok tidak memberikan secara detail pengalokasian anggaran pertahannya tersebut.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://dunia.tempo.co/read/1066779/wow-anggaran-militer-2018-cina-jadi-rp-2500-triliun</p> <p>1. Kepulauan yang menjadi konflik wilayah ini adalah Senkaku (nama dari Jepang) dan Diaoyu (nama dari Tiongkok) merupakan wilayah yang beradadi wilayah Laut China Selatan dimana permasalahan ini sudah berlangsung cukup lama, namun dikarenakan ada tumpang tindihnya klaim wilayah membuat kedua negara ini berusaha untuk mendapatkan Kepulauan tersebut.</p>
--	---------------------------	--

		<p>Sumber:</p> <p>https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/09/120911_islandsqanda</p> <p>2. Dengan banyaknya kepentingan nasional dalam wilayah Laut China Selatan maka Tiongkok dianggap sangat ingin menguasai wilayah tersebut. Salah satunya yaitu karena Laut China Selatan memiliki peran penting dalam memasok 10% dari hasil tangkapan di dunia, kawasan ini juga menjadi perlintasan bagi kapal-kapal kargo yang membawa muatan dalam jumlah besar baik dari Jepang ataupun menuju Jepang. Menteri Pertahanan Gen Nakatani berkata bahwa situasi di Laut China Selatan mempunyai dampak pertahanan nasional Jepang.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://news.okezone.com/read/2015/02/04/18/1101427/jepang-ingin-peran-lebih-di-laut-china-selatan</p>
<p>Variabel Terikat:</p> <p>Implementasi Kebijakan Reinterpretasi Pasal 9 Jepang</p>	<p>1. <i>Proactive Contribute to Peace</i></p>	<p>1. <i>Proactive Contribute to Peace</i> tetap menjadi acuan dalam Jepang untuk melangkah lebih aktif dalam peran nya yang akan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,</p> <p>Sumber:</p> <p>https://www.eastasiaforum.org/2015/11/02/proactive</p>

	<p>2. Reinterpretasi Pasal 9</p>	<p>-diplomacy-for-peace-under-japans-new-security-legislation/</p> <p>2. Perdana Menteri Shinzo Abe memiliki visi yang jelas dalam kebijakan dasar ini, tujuannya yaitu untuk mengubah situasi dan membuat Jepang tidak lagi menjadi konsumen keamanan dan lebih menjadi penyedia keamanan dengan tetap berpegang pada <i>Proactive Contribute to Peace</i>.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://www.nippon.com/en/column/g00328/</p> <p>1. Adanya penafsiran ulang dari Pasal 9 dikarenakan menanggapi perubahan keadaan didalam dan diluar Jepang, meskipun teks Pasal 9 tidak berubah sama sekali, namun interpretasinya dalam praktiknya telah di bentuk oleh perubahan kondisi eksternal, teknologi senjata dan pergeseran politik.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/japans-article-9-challenge-10766</p> <p>2. Jepang dalam era Shnizo Abe mengizinkan peran militer diluar negeri dalam Langkah bersejarah,</p>
--	----------------------------------	---

	<p>3. Dynamic Joint Defense Force</p>	<p>karena hal itu sudah berakhir sejak adanya Perang Dunia II 70 tahun lalu. RUU itu ditentang oleh 90 parleme, namun disahkan oleh 148 anggota parlemen (memberikan dukungan).</p> <p>Sumber:</p> <p>https://www.bbc.com/news/world-asia-34287362</p> <p>1. Pemerintah Shizo Abe mengkhawatirkan tentang lintasan strategis Tiongkok dan perubahan pada postur kekuatan JSDF, tantangan terbesar yaitu militer Tiongkok yang berkembang maka dari itu JSDF di modernisasi, diikuti oleh adanya ancaman lain yaitu program rudal Korea Utara. Maka dari itu pemerintah Shinzo Abe mengumumkan kemampuan baru JSDF.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://www.aspistrategist.org.au/moving-forward-japans-2014-defence-white-paper/</p> <p>2. Kekuatan maritime Tiongkok yang berkembang mengubah keseimbangan strategis diantara kekuatan-kekuatan Asia. Maka dari itu Jepang harus menyeimbangkan hal tersebut dengan meningkatkan kemampuannya dengan memperkuat kemampuan</p>
--	---------------------------------------	---

	<p>4. Aliansi Jepang dan Amerika Serikat</p>	<p>intelijen, pengawasan, dan pengintaian serta perang anti-kapal selam untuk mempertahankan perairan sekitar Jepang.</p> <p>Sumber:</p> <p>http://www.cogitasia.com/balancing-the-rise-of-maritime-china-japans-dynamic-joint-defense-force/</p> <p>1. Jepang memperkuat aliansi untuk <i>Rebalancing</i> di Kawasan Asia Pasifik dengan memperkuat dan juga memperluas Kerjasama di berbagai bidang serta memberikan dukungan yang stabil untuk pasukan Amerika Serikat</p> <p>Sumber:</p> <p>http://japan.kantei.go.jp/96_abe/documents/2013/_icsFiles/afieldfile/2014/02/03/NDPG.pdf</p> <p>2. Jepang menerapkan militer yang lebih aktif, disamping menegaskan adanya dukungan dari Amerika Serikat terhadap Jepang, Shinzo Abe melakukan rundingan</p> <p>Sumber:</p> <p>https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150427_jepang_as_pertahanan</p>
--	--	---

	<p>5. Kemitraan Strategis</p>	<p>1. Bagi Jepang, Indonesia adalah negara strategis untuk kemitraan jangka panjang. Tahun 2017 Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Joko Widodo bersepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di berbagai bidang terutama di bidang keamanan laut.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://economy.okezone.com/read/2017/01/16/320/1592338/ri-jepang-perkuat-kemitraan-strategis</p> <p>2. Kerjasama yang dilakukan oleh Filipina dan Jepang ini merupakan sikap siaga dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan, Filipina menyerahkan daftar perlengkapan pertahanan ke Jepang untuk meningkatkan keamanan maritim.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://nasional.sindonews.com/berita/1006302/149/filipina-jepang-perkuat-kerja-sama-militer</p>
--	-------------------------------	---

2.5. Skema dan Alur Penelitian



